



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Perkembangan Teori Pidana dan Urgensi Konsep Pemaafan Hakim Dalam RKUHP	1
1.2 Pandangan Teori Keadilan dan Teori-Teori Lain Dalam Ilmu Hukum Pidana	18
BAB II KESALAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA	37
2.1 Sistem Peradilan Pidana	37
2.2 Teori Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana	45
2.3 Doktrin Dualisme Di dalam Sistem Pidana	52
2.4 Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Di dalam Sistem Pidana	63
2.5 Tujuan Pidana di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)	76
BAB III LEMBAGA PEMAAFAN HAKIM ( <i>RECHTERLIJK PARDON</i> ) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA	95
3.1 Lembaga Pemaafan Hakim ( <i>Rechterlijk Pardon</i> ) dan Penerapannya di Beberapa Negara	95

3.2	Lembaga Pemaafan Hakim ( <i>Rechterlijk Pardon</i> ) dalam Sistem Hukum Islam	103
3.3	Hasil Temuan Putusan Perkara Pidana	113
<b>BAB IV</b>	<b>PENERAPAN KONSEP PEMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) YANG IDEAL DALAM RKUHP DIHARMONISASIKAN DENGAN RKUHAP</b>	<b>129</b>
4.1	Harmonisasi Konsep Pemaafan Hakim ( <i>Rechterlijk Pardon</i> ) dalam RKUHP	129
4.1.1	Analisis Kritis Terhadap Pidana Penjara	131
4.1.2	Penerapan Pemaafan Hakim ( <i>Rechterlijk Pardon</i> ) yang Ideal Dalam RKUHP	155
4.2	Harmonisasi Konsep Pemaafan Hakim ( <i>Rechterlijk Pardon</i> ) Dalam RKUHAP	170
4.2.1	Filterisasi Terhadap Perkara Sebelum Adanya Pemaafan Hakim ( <i>Rechterlijk Pardon</i> ) di Pengadilan	179
4.2.2	Jenis Putusan Pemaafan Hakim ( <i>Rechterlijk Pardon</i> ) Dalam RKUHAP	186
<b>BAB V</b>	<b>PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA YANG MENCERMINKAN NUANSA PEMAAFAN HAKIM</b>	<b>205</b>
5.1	Ambiguitas Penerapan Konsep Pemaafan Hakim dalam Putusan Pengadilan di Indonesia Berdasarkan KUHP dan KUHAP	205
5.2	Analisis Kasus yang Mencerminkan Penerapan Konsep Pemaafan Hakim dalam Putusan Pengadilan di Indonesia	210
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>249</b>
	<b>TENTANG PENULIS</b>	<b>267</b>